



# GUBERNUR SUMATERA BARAT

## KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 856 - 2023

### TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Wali Kota.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

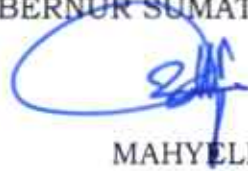
MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Wali Kota Padang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Kota Padang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Wali Kota Padang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Wali Kota, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Wali Kota Padang menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Wali Kota Padang menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22 Desember 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
NOMOR 903 - 856 - 2023  
TANGGAL 22 DESEMBER 2023  
TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH KOTA PADANG TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN  
WALI KOTA PADANG TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA PADANG  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Wali Kota, meliputi:

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Wali Kota Padang dan DPRD dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1

Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024	11 Tahun 2023	27 Juni 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan)



No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS TA. 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD (sesuai tanggal tanda terima dokumen dari DPRD/Setwan)	900.III/03.02/BU/2023	5 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli 2023)
3	Kesepakatan Rancangan Perubahan KUA TA. 2024 antara Kepala Daerah dan DPRD	<u>183.384/Huk-Pdg/2023</u> 02/DPRD-Pdg/2023	4 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2023)
4	Kesepakatan Rancangan PPAS TA. 2024 antara Kepala Daerah dan DPRD Kota Padang	<u>183.385/Huk-Pdg/2023</u> 03/DPRD-Pdg/2023	4 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus 2023)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2024 oleh Kepala Daerah kepada	900.1.1.2/02.16/BPKA D/IX/2023	8 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September 2023)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD TA. 2024	<u>183.17/Huk.Pdg/2023</u> 08/DPRD-Pdg/2023	30 November 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan atau paling lambat tanggal 30 November 2023)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD Ta. 2024 ke Gubernur untuk dievaluasi	900/45.21/BPKAD.AGR / 2023	1 Desember 2023	Sesuai, (disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama)

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Wali Kota Padang dan DPRD pada tanggal 30 November 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 01 Desember 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

RKPD Kota Padang Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024 ditetapkan pada tanggal 27 Juni 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Wali Kota menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Wali Kota Padang kepada DPRD Kota Padang pada tanggal 05 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Wali Kota Padang dengan DPRD Kota Padang terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 4 Agustus 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 oleh Wali Kota Padang kepada DPRD Kota Padang pada tanggal 08 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kota Padang dengan Wali Kota Padang pada tanggal 30 November 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

*Kedepannya Wali Kota dan DPRD Kota Padang agar tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.*

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan

penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pemerintah Kota Padang dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menyusun prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.249.627.970.195,56 atau 94,59% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.378.293.522.274,00 dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 pada sampai dengan 10 November 2023 sebesar Rp1.946.551.206.819,85 atau 80,05% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan **kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah** dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.224.959.294.893,27 atau 91,49% dari total belanja



daerah dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.432.047.873.684,00 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai 10 November sebesar Rp1.736.977.514.621,77 atau 69,49% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2023.

- b. Pemerintah Daerah Kota Padang menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023..
- d. belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:
  - 1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
    - a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
    - b) peningkatan pendapatan masyarakat.
    - c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
  - 2) penurunan stunting antara lain:
    - a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
    - b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
    - c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan; dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
  - 3) pengendalian inflasi antara lain:
    - a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
    - b) pengendalian laju alih fungsi lahan.
    - c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.
    - d) penguatan tata kelola logistik daerah.
    - e) pengawasan harga dan operasi pasar.
  - 4) peningkatan investasi antara lain:
    - a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS).
    - b) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
  - 5) penguatan kualitas sumber daya manusia;
  - 6) pembangunan infrastruktur; dan
  - 7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).

- e. Pemerintah Kota Padang menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
  - f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kota Padang memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
  - g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
  - b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

### III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

#### A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.530.090.703.322,00 mengalami pengurangan sebesar Rp(39.756.245.042,00) atau (1,55%) dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.569.846.948.364,00.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp706.838.011.883,00.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp1.819.520.691.439,00.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp3.732.000.000,00.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.530.090.703.322,00 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2  
Pendapatan Daerah

Kode	Uraian	APBD 2024
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	706.838.011.883,00
4.1.01	Pajak Daerah	550.283.771.238,00
4.1.02	Retribusi Daerah	45.515.024.042,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.630.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	86.409.216.603,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.819.520.691.439,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.689.968.739.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	129.551.952.439,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.732.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	3.732.000.000,00
Jumlah Pendapatan		2.530.090.703.322,00

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp706.838.011.883,00.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1  
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%		APBD Tahun Anggaran 2023		%		Target APBD Tahun Anggaran 2024		Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024		% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD TA. 2023 per 10 November 2023	
	Target		Realisasi		Target		Realisasi Per 10 November 2023		(Rp)		(Rp)		(%)	
	2	3	4-3-2	5	6	7-6-5	8	9-8-5						
1														
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>733.347.779.600,00</b>	<b>612.831.641.368,56</b>	<b>83,57</b>	<b>928.650.983.599,00</b>	<b>632.495.560.168,85</b>	<b>67,34</b>	<b>706.838.011.883,00</b>	<b>(221.812.971.716,00)</b>						
Pajak Daerah	854.385.936.163,00	438.181.440.175,00	79,04	741.400.983.599,00	396.400.877.669,00	53,47	860.243.771.238,00	(191.117.212.361,00)						
Pajak Hotel	48.000.000.000,00	48.709.250.010,00	101,48	55.000.000.000,00	46.129.371.516,00	83,87	55.000.000.000,00	0,00						
Pajak Restoran	60.000.000.000,00	62.122.927.431,00	103,54	65.000.000.000,00	58.508.797.968,00	90,15	70.000.000.000,00	5.000.000.000,00						
Pajak Hiburan	7.000.000.000,00	7.175.646.608,00	102,51	10.000.000.000,00	7.543.195.671,00	75,43	10.000.000.000,00	0,00						
Pajak Reklame	12.000.000.000,00	12.444.841.000,00	103,71	15.000.000.000,00	11.326.973.603,00	75,51	15.000.000.000,00	0,00						
Pajak Penerangan Jalan	114.000.000.000,00	114.681.667.820,00	100,60	120.000.000.000,00	98.654.404.505,00	82,21	121.000.000.000,00	0,00						
Pajak Parkir	2.000.000.000,00	1.760.716.816,00	88,04	3.000.000.000,00	1.610.076.424,00	53,67	3.500.000.000,00	500.000.000,00						
Pajak Air Tanah	3.000.000.000,00	3.462.395.057,00	115,41	5.000.000.000,00	2.526.117.185,00	50,52	4.000.000.000,00	41.000.000.000,00						
Pajak Sewang Burung Walet	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	75.000.000,00	9.000.000,00	12,00	50.000.000,00	(25.000.000,00)						
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	26.500.000.000,00	28.620.578.343,0	100,42	41.000.000.000,00	26.868.523.400,00	65,53	30.000.000.000,00	(11.000.000.000,00)						
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBPP2)	78.000.000.000,00	66.506.727.697,00	85,27	80.000.000.000,00	65.264.383.610,00	81,58	80.000.000.000,00	0,00						
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	201.870.936.163,00	92.681.689.393,00	45,91	347.325.983.599,00	77.870.033.697,00	22,42	161.733.771.238,00	(185.592.212.361,00)						
<b>Retribusi Daerah</b>	<b>52.911.390.667,00</b>	<b>41.262.274.570,00</b>	<b>77,98</b>	<b>63.406.634.229,00</b>	<b>39.660.471.928,69</b>	<b>62,39</b>	<b>45.515.024.042,00</b>	<b>(17.891.610.187,00)</b>						
Retribusi Jasa Umum	35.569.899.017,00	30.538.423.726,00	85,85	34.586.701.014,00	26.505.717.621,69	76,64	28.205.128.478,00	(6.381.572.536,00)						
Retribusi Jasa Usaha	8.032.286.052,00	6.524.780.844,00	81,23	14.197.569.822,00	6.111.176.304,00	43,04	10.229.895.564,00	(3.967.674.258,00)						
Retribusi Perizinan Tertentu	9.309.105.598,00	4.199.070.000,00	45,11	14.622.363.393,00	6.943.578.000,00	47,49	7.080.000.000,00	(7.542.363.393,00)						
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>17.855.318.019,00</b>	<b>16.537.826.409,00</b>	<b>94,20</b>	<b>20.000.000.000,00</b>	<b>20.067.188.003,00</b>	<b>100,34</b>	<b>24.630.000.000,00</b>	<b>4.630.000.000,00</b>						

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%	APBD Tahun Anggaran 2023		%	Target APBD Tahun Anggaran 2024	Salah Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024	%	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD TA. 2023 per 10 November 2023
	Target	Realisasi		Target	Realisasi Per 10 November 2023					
1	2	3	4=3:2	5	6	7=6:5	8	9=8:5	10=9:5	11=8:6
Bagian laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	17.555.318.019,00	16.537.326.409,00	94,20	20.000.000.000,00	20.067.188.003,00	100,34	24.630.000.000,00	4.630.000.000,00	23,15	192,74
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	108.495.234.751,00	116.850.400.714,56	107,70	103.843.366.771,00	76.467.022.571,16	73,64	86.409.216.603,00	(17.434.149.168,00)	(16,79)	113,00
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	933.000.000,00	2.544.174.024,00	272,69	370.000.000,00	419.801.330,00	113,46	644.500.000,00	274.500.000,00	74,19	153,53
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.193.365.770,00	4.791.377.520,10	92,26	5.303.365.771,00	4.319.444.981,00	81,45	4.554.716.603,00	(748.649.168,00)	(14,12)	105,45
Jasa Giro	2.000.000.000,00	2.130.531.392,13	106,53	4.000.000.000,00	1.672.591.071,80	41,81	2.000.000.000,00	(2.000.000.000,00)	(50,00)	119,57
Pendapatan Bunga	1.500.000.000,00	1.952.634.424,00	130,18	4.000.000.000,00	2.677.701.628,00	66,94	2.500.000.000,00	(1.500.000.000,00)	(37,50)	93,36
Pencetakan atas Tututan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	2.100.000.000,00	2.790.125.329,53	132,86	1.170.000.000,00	5.696.872.540,36	486,91	500.000.000,00	(670.000.000,00)	(57,26)	6,78
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	3.099.681.981,00	2.037.210.104,21	65,72	1.000.000.000,00	35.973.827,00	3,60	1.000.000.000,00	0,00	0,00	2.779,80
Pendapatan Denda Pajak Daerah	5.980.000.000,00	2.042.629.868,00	34,16	6.000.000.000,00	1.582.643.816,00	26,38	0,00	(6.000.000.000,00)	(100,00)	0,00
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	20.000.000,00	56.459.583,00	282,30	0,00	79.692.853,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	50.000.000,00	225.360.040,59	450,72	450.000.000,00	48.519.000,00	10,78	100.000.000,00	(350.000.000,00)	(77,78)	206,10
Pendapatan dari Pengembalian	100.000.000,00	374.172.016,00	374,17	1.000.000.000,00	295.789.136,00	29,58	100.000.000,00	(900.000.000,00)	(90,00)	33,81
Pendapatan Denda Pembiayaan BMD yang tidak Dipisahkan	87.504.187.000,00	97.899.913.813,00	111,88	80.500.000.000,00	59.607.476.590,00	74,05	75.000.000.000,00	(5.500.000.000,00)	(6,83)	125,82
Pendapatan Denda Pembiayaan BMD yang tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	29.696.723,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hasil Pengeluaran Dana Bergilir	15.000.000,00	6.012.600,00	40,08	50.000.000,00	819.075,00	1,64	10.000.000,00	(40.000.000,00)	(80,00)	1.220,89

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp550.283.771.238,00.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Hotel sebesar Rp55.000.000.000,00.
- 2) Pajak Restoran sebesar Rp70.000.000.000,00.
- 3) Pajak Hiburan sebesar Rp10.000.000.000,00.
- 4) Pajak Reklame sebesar Rp15.000.000.000,00.
- 5) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp121.000.000.000,00.
- 6) Pajak Parkir sebesar Rp3.500.000.000,00.
- 7) Pajak Air Tanah sebesar Rp4.000.000.000,00.
- 8) Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp50.000.000,00.
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp30.000.000.000,00.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp80.000.000.000,00.
- 11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp161.733.771.238,00.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.515.024.042,00.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp28.205.128.478,00 dengan rincian antara lain :
  - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp15.455.000.000,00.
  - b) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat sebesar Rp2.000.000.000,00.
  - c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebesar Rp6.492.400.000,00.
  - d) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp3.504.088.478,00.
  - e) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebesar Rp753.640.000,00.

**Terhadap pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.**



- 2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp10.229.895.564,00 dengan rincian antara lain :
  - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.283.896.644,00.
  - b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan sebesar Rp2.422.554.920,00.
  - c) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp381.600.000,00.
  - d) Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila sebesar Rp28.600.000,00.
  - e) Retribusi Rumah Potong Hewan sebesar Rp657.000.000,00.
  - f) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebesar Rp1.555.000.000,00.
  - g) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebesar Rp3.901.244.000,00.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp7.080.000.000,00 dengan rincian antara lain :
  - a) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebesar Rp7.000.000.000,00.
  - b) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebesar Rp80.000.000,00.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan

untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
- (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
  - (i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
  - (ii). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
  - (iii). untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
  - (iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
  - (v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang.

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

*Berdasarkan realisasi pendapatan per 10 November 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang sebesar Rp542.833.478.100,85 atau 74,37% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp729.911.859.086,00, yang diuraikan antara lain :*

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp404.700.870.922,00 atau 70,78% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp571.804.687.930,00.

- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp40.390.747.506,69 atau 89,49% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.136.239.965,00.

*Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kota Padang perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kota Padang merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.*

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp24.630.000.000,00.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kota Padang, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kota Padang sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kota Padang, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu

melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kota Padang yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang.

Selain itu, Pemerintah Kota Padang juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kota Padang sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp86.409.216.603,00, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp644.500.000,00.
- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp4.554.716.603,00.
- 3) Jasa Giro sebesar Rp2.000.000.000,00.
- 4) Pendapatan Bunga sebesar Rp2.500.000.000,00.
- 5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp500.000.000,00.
- 6) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp1.000.000.000,00.
- 7) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp100.000.000,00.
- 8) Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp100.000.000,00.
- 9) Pendapatan BLUD Rp75.000.000.000,00.
- 10) Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebesar Rp10.000.000,00.

Terhadap alokasi anggran Lain-lain PAD agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk pendapatan bunga atas penempatan uang daerah sebesar Rp2.500.000.000,00, disarankan kepada Pemerintah Kota Padang untuk melakukan manajemen kas atas rekening Kas Umum Pemda dengan melakukan penempatan deposito berjangka di Bank Daerah sehingga ada kemungkinan diperolehnya bunga deposito yang jauh lebih besar dari yang dianggarkan saat ini.
- b. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya terkait pendapatan retribusi, pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan agar dipindahkan penganggarnya ke Retribusi Pelayanan Kesehatan

### 3. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.819.520.691.439,00 atau 71,92% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada jenis pendapatan :

#### a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.689.968.739.000,00 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp1.681.690.061.000,00 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
  - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp76.667.744.000,00.
  - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.240.351.499.000,00.
  - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp23.245.625.000,00.
  - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp341.425.193.000,00.
- 2) Insentif Fiskal sebesar Rp8.278.678.000,00.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kota Padang :

Tabel 3  
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah (Rp)		selisih
	APBD 2024	Portal Resmi Kemenkeu	
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.693.700.739.000,00</b>	<b>1.693.700.739.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.689.968.739.000,00</b>	<b>1.689.968.739.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.681.690.061.000,00</b>	<b>1.681.690.061.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)</b>	<b>76.667.744.000,00</b>	<b>76.667.744.000,00</b>	<b>0</b>
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	5.294.106.000,00	5.294.106.000,00	0
DBH PPh Pasal 21	63.464.141.000,00	63.464.141.000,00	0
DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	35.943.000,00	35.943.000,00	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	150.647.000,00	150.647.000,00	0
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara_x005fRoyalty	708.850.000,00	708.850.000,00	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	64.336.000,00	64.336.000,00	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.926.322.000,00	1.926.322.000,00	0
DBH Sumber Daya Alam (SDA) SAWIT	5.023.399.000,00	5.023.399.000,00	0

Uraian	Jumlah (Rp)		selisih
	APBD 2024	Portal Resmi Kemenkeu	
<b>Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)</b>	<b>1.240.351.499.000,00</b>	<b>1.240.351.499.000,00</b>	<b>0</b>
DAU	1.240.351.499.000,00	1.240.351.499.000,00	0
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</b>	<b>23.245.625.000,00</b>	<b>23.245.625.000,00</b>	<b>0</b>
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	255.363.000,00	255.363.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.371.429.000,00	1.371.429.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.950.291.000,00	2.950.291.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	966.760.000,00	966.760.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	1.686.081.000,00	1.686.081.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	5.953.544.000,00	5.953.544.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.201.538.000,00	1.201.538.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	226.474.000,00	226.474.000,00	0
DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	3.134.145.000,00	3.134.145.000,00	0
<b>Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</b>	<b>341.425.193.000,00</b>	<b>341.425.193.000,00</b>	<b>0</b>
DAK Non Fisik-BOS Reguler	119.695.700.000,00	119.695.700.000,00	0
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.762.500.000,00	3.762.500.000,00	0
DAK Non Fisik-TPG PNSD	157.080.722.000,00	157.080.722.000,00	0
DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.733.966.000,00	1.733.966.000,00	0
DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	545.344.000,00	545.344.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	1.638.000.000,00	1.638.000.000,00	0
DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	638.227.000,00	638.227.000,00	0
DAK Non Fisik-BOKB-KB	7.377.313.000,00	7.377.313.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	2.286.141.000,00	2.286.141.000,00	0
DAK Non Fisik-PK2UMK	391.190.000,00	391.190.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	9.278.400.000,00	9.278.400.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	315.000.000,00	315.000.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	5.461.700.000,00	5.461.700.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	16.280.843.000,00	16.280.843.000,00	0
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	14.805.147.000,00	14.805.147.000,00	0
<b>Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fiskal</b>	<b>8.278.678.000,00</b>	<b>8.278.678.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Pendapatan Hibah</b>	<b>3.732.000.000,00</b>	<b>3.732.000.000,00</b>	<b>0</b>
<b>Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat</b>	<b>3.732.000.000,00</b>	<b>3.732.000.000,00</b>	<b>0</b>



Pemerintah Kota Padang agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari Kementerian Keuangan.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp129.551.952.439,00, yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.565.006.041.510,00.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kota Padang dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.565.006.041.510,00 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4  
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.356.815.426.414,00</b>
Belanja Pegawai	1.354.560.553.239,00
Belanja Barang dan Jasa	847.916.275.379,00
Belanja Bunga	1.782.143.397,00
Belanja Subsidi	39.786.615.000,00
Belanja Hibah	103.283.659.399,00
Belanja Bantuan Sosial	9.486.180.000,00
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>196.381.061.744,00</b>
Belanja Modal Tanah	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	48.902.436.709,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	59.435.068.323,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	77.488.913.706,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.805.534.006,00
Belanja Modal Aset Lainnya	749.109.000,00
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>11.809.553.352,00</b>
Belanja Tidak Terduga	11.809.553.352,00
<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>-</b>
Belanja Bantuan Keuangan	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.565.006.041.510,00</b>

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp83.475.442.732,00 atau 9,33% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp895.067.404.463,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp55.163.459.840,00, alokasi anggarannya diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
  - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
  - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
  - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
  - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.

- e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
  - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp21.533.982.892,00, alokasi anggaran diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
  - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
  - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
  - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
  - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
  - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sebesar Rp6.280.260.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
  - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
  - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
  - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
  - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp 497.740.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
- a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
  - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
  - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
  - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
  - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

- f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp36.000.000.000,00, alokasi anggaran diprioritaskan untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp2.469.640.000,00, alokasi anggaran diprioritaskan untuk menjamin tersedianya:
  - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
  - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
  - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
  - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp9.451.200.000,00, alokasi anggaran diprioritaskan untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan

sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp848.460.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk menjamin:
  - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
  - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
  - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
  - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp4.086.000.000,00, alokasi anggaran diprioritaskan untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp0,00 atau **belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk menjamin:
  - a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
  - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
  - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp0 atau **belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
  - a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
  - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
  - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
  - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp5.056.108.500,00 atau 1,25% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp405.698.698.737,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis



Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp2.192.940.800,00, alokasi anggarannya diprioritaskan pada sub kegiatan tersebut untuk :
  - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
  - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
    - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
    - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LILA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp454.662.800,00, **agar ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
  - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
  - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp100.000.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
  - a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/ dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
  - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
    - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
    - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam – 28 hari).

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi sebesar Rp170.000.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
  - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
    - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
    - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp994.445.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
  - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
    - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
    - (2) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan

rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp199.320.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
  - a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
  - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
  - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
    - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
    - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
    - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp60.000.000,00 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
  - a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
  - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
    - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
    - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
  - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp50.000.000,00, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
  - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
    - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
    - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
    - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp50.000.000,00, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
  - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
  - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
    - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
    - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
    - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp100.000.000,00, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
  - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
  - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
    - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
    - (2) Edukasi.
    - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
    - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.

(5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp207.620.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
  - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
  - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
  - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
  - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp477.119.900,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
  - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
  - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
  - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp626.049.000,00 atau 0,80% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp78.648.965.077,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp626.049.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau belum dianggarkan, **agar disediakan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah

Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

*Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.*

*Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 **dalam rangka pemenuhan SPM** tersebut.*

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp1.078.110.000,00 atau 1,36% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp79.482.084.774,00 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp200.000.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan

potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.

- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp210.000.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.
- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp668.110.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
  - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
  - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi rumah bencana, dan pembangunan rumah.
  - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp Rp0,00 atau **belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.



e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp4.060.363.924,00 atau 29,99% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp13.539.875.158,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni:
  - a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp801.928.224,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
  - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp2.652.435.700,00, alokasi anggarannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
  - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp606.000.000,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah sebesar Rp7.927.774.500,00 atau 42,35% dari total belanja Dinas Pemadam Kebakaran Rp18.720.486.527,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni:
  - a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp7.744.683.000,00, alokasi anggaran diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan

pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.

- b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar Rp183.091.500,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
  - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia sebesar Rp0,00 atau **belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.
- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp16.907.239.400,00 atau 49,08% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja sebesar Rp34.451.416.618,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebesar Rp16.907.239.400,00, alokasi anggarannya diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
  - b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 **atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.

- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp2.205.940.300,00 atau 10,50% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp21.000.584.211,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar Rp1.840.940.400,00, dialokasikan anggarannya untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
  - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
  - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
  - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan

karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya

- d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanaan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.
- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp364.999.900,00, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
  - a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanaan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
  - b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentandan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5  
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Padang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	51.374.515.005	2,00
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	48.504.703.184	1,89
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	303.607.267.360	11,84
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	51.620.521.526	2,01
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	139.733.464.137	5,45
6	Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	129.626.816.474	5,05
7	Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	1.840.538.753.824	71,76
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.565.006.041.510	100,00
Total Belanja Daerah		2.565.006.041.510	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun 2024 **sudah selaras** dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
  - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
  - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
  - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. dan
  - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kota Padang Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024, sebagai berikut :

Tabel 6  
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan  
Pemerintah Kota Padang dengan Prioritas Pembangunan  
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provincial	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Mewujudkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	303.607.267.360	11,84
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	63.673.387.226	2,48
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	6.514.454.325	0,25
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil / menengah serta ekonomi berbasis digital	23.280.491.928	0,91

No	Prioritas Provinsi	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	21.579.568.752	0,84
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	305.193.231.945	11,90
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	1.841.157.639.974	71,78
	<b>Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD</b>	<b>2.565.006.041.510</b>	<b>100,00</b>
	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>2.565.006.041.510</b>	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga belum terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi antara kebijakan Pemerintah Kota Padang dengan prioritas provinsi Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kota Padang Tahun 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kota Padang telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7  
Alokasi Anggaran Pemerintah Kota Padang  
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Daerah	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Sistem Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga dan Lingkungan yang Sehat	388.132.583.044	15,13
2.	Peningkatan dan Penataan Infrastruktur/ Sarana Prasarana Perkotaan dan Transportasi Kota Berbasis Ramah Lingkungan	149.325.499.365	5,82
3.	Peningkatan Penataan Ruang dan Pembangunan Kawasan Permukiman yang Ramah	43.336.423.650	1,69
4.	Pembangunan Ekonomi Inklusif Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	15.861.885.025	0,62

No	Prioritas Daerah	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
5.	Peningkatan Sarana Prasarana Perdagangan dan Penguatan Kemitraan Dalam Perdagangan	15.996.250.404	0,62
6.	Pengembangan Industri Pariwisata Berbasis Potensi Sumberdaya dan Kemitraan	18.868.132.576	0,74
7.	Optimalisasi Mitigasi Bencana Berbasis Komunitas Cerdas Bencana	45.167.936.574	1,76
8.	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Melalui Penguatan Sistem Budaya Kerja dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.877.938.075.216	73,21
9.	Peningkatan Iklim Investasi dan Kemudahan Berusaha	10.379.255.656	0,40
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		2.565.006.041.510	100,00
Total Belanja Daerah		2.565.006.041.510	

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun 2024 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Padang sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Padang Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp912.897.291.906,00 atau 35,59% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.565.006.041.510,00, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8  
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	APBD 2024	Selisih
1	2	3	4	5=4-3
1	a. Urusan Bidang Pendidikan:	938.793.021.801,00	896.067.404.463,00	(43.725.617.338,00)
	1) Belanja Operasi:	758.682.719.239,00	838.164.886.345,00	79.482.167.106,00
	a. belanja pegawai;	593.875.743.602,00	654.050.549.614,00	60.174.806.012,00
	b. belanja barang dan jasa;	117.734.137.553,00	137.403.325.847,00	19.669.188.294,00
	c. belanja hibah;	42.770.338.084,00	43.385.510.884,00	615.172.800,00
	d. belanja bantuan sosial.	4.302.500.000,00	3.325.500.000,00	(977.000.000,00)
	2) Belanja Modal;	180.110.302.562,00	56.902.518.118,00	(123.207.784.444,00)



NO	Komponen Perhitungan	Jumlah		
		APBD 2023	APBD 2024	Salah
	<b>b. Urusan Bidang Kebudayaan:</b>	<b>3.399.633.800,00</b>	<b>2.903.599.905,00</b>	<b>(496.033.895,00)</b>
	1) Belanja Operasi:	3.399.633.800,00	2.307.506.905,00	(1.092.126.895,00)
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	2.326.133.800,00	2.087.506.905,00	(238.626.895,00)
	c. belanja hibah;	1.073.500.000,00	220.000.000,00	(853.500.000,00)
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	-	596.093.000,00	596.093.000,00
	<b>c. Urusan Bidang Perpustakaan:</b>	<b>6.394.559.809,00</b>	<b>6.903.895.084,00</b>	<b>509.335.275,00</b>
	1) Belanja Operasi:	6.083.546.609,00	6.659.180.084,00	575.633.475,00
	a. belanja pegawai;	-	-	1.209.812.555,00
	b. belanja barang dan jasa;	2.206.321.600,00	1.572.142.520,00	(634.179.080,00)
	c. belanja hibah;	-	-	-
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal.	311.013.200,00	244.715.000,00	(66.298.200,00)
	<b>d. Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga:</b>	<b>27.286.328.916,00</b>	<b>17.806.867.172,00</b>	<b>(9.479.461.744,00)</b>
	1) Belanja Operasi:	27.130.283.216,00	16.520.057.572,00	(10.610.225.644,00)
	a. belanja pegawai;	-	-	-
	b. belanja barang dan jasa;	7.422.198.350,00	4.801.120.418,00	(2.621.077.932,00)
	c. belanja hibah;	16.014.000.000,00	7.021.500.000,00	(8.992.500.000,00)
	d. belanja bantuan sosial.	-	-	-
	2) Belanja Modal;	156.045.700,00	1.286.809.600,00	1.130.763.900,00
	<b>e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di bidang Pendidikan, antara lain:</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>(150.000.000,00)</b>
	1) Belanja Transfer:	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
	Belanja bantuan keuangan	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
<b>2</b>	<b>Anggaran Fungsi Pendidikan</b>	<b>968.482.234.451,00</b>	<b>912.897.291.906,00</b>	<b>(55.584.942.545,00)</b>
<b>3</b>	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>2.578.196.948.364,00</b>	<b>2.565.006.041.810,00</b>	<b>(13.190.906.554,00)</b>
<b>4</b>	<b>Rasio anggaran pendidikan (2:3) x 100%</b>	<b>37,56%</b>	<b>35,59%</b>	<b>-1,97%</b>

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kota Padang.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Wali Kota Padang sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp413.896.035.537,00 atau 23,82% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.737.480.031.554,00.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kota Padang secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
- 3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*;
- c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
- e) penguatan jejaring layanan primer; dan
- f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kesehatan agar terus ditingkatkan di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kota Padang agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting*

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan **prevalensi *stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp11.442.929.500,00 atau 2,76% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp413.896.036.537,00.

Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan *stunting* sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan *stunting* sebesar Rp11.442.929.500,00 atau sekitar 0,45% dari total belanja dalam Rancangan APBD Tahun 2024 sebesar Rp2.565.006.041.510,00. Untuk itu, Kota Padang agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan *stunting* terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan *stunting*, agar diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:

- (1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
- (2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses

layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.

- (3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kota Padang harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp369.400.132.063,00 atau 14,40% dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp2.565.006.041.510,00, dengan rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel 9  
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	Jumlah		
		APBD 2023	APBD 2024	Selisih
1	Total Belanja Daerah	2.578.196.948.364,00	2.565.006.041.510,00	(13.190.906.854,00)
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa:			
	a. belanja bagi hasil	-	-	-
	b. bantuan keuangan	-	-	-
	c. jumlah (a+b)	-	-	-
3	Selisih (1-2)	2.578.196.948.364,00	2.565.006.041.510,00	(13.190.906.854,00)
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	1.031.278.779.345,60	1.026.002.416.604,00	(5.276.362.741,60)

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp369.400.132.063,00, dengan rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10  
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		Jumlah		
			APBD 2023	APBD 2024	Salinit
1.	a	Belanja Modal:	400.477.618.137,00	196.381.061.744,00	(204.096.556.393,00)
		1) tanah;	-	-	-
		2) peralatan dan mesin;	54.696.934.725,00	48.902.436.709,00	(5.794.498.016,00)
		3) bangunan dan gedung;	262.227.988.219,00	59.435.068.323,00	(202.792.919.896,00)
		4) jalan, jaringan, dan irigasi;	70.904.704.389,00	77.488.913.706,00	6.584.209.317,00
		5) aset tetap lainnya;	11.597.990.804,00	9.805.534.006,00	(1.792.456.798,00)
		6) aset lainnya.	1.050.000.000,00	749.109.000,00	(300.891.000,00)
	b	Belanja Pemeliharaan	36.510.420.518,00	60.249.230.920,00	23.738.810.402,00
		Jumlah 1 = (a + b)	436.988.038.655,00	256.630.292.664,00	(180.357.745.991,00)
2.	a	Belanja Hibah;	101.606.411.472,00	103.283.659.399,00	1.677.247.927,00
	b	Belanja Bantuan Sosial;	20.025.200.008,00	9.486.180.000,00	(10.539.020.008,00)
	c	Belanja Bantuan Keuangan.	150.000.000,00	-	(150.000.000,00)
		Jumlah 2 = (a + b + c)	121.781.611.480,00	112.769.839.399,00	(9.011.772.081,00)
3.		Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	558.769.650.135,00	369.400.132.063,00	(189.369.518.072,00)
		Persentase	21,67%	14,40%	-7,27%

Pemerintah Kota Padang **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang *harus mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen)* sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga *batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027* sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota Padang (di luar gaji dan tunjangan) sebesar Rp2.764.258.250,00 atau 0,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kota Padang antara lain tercantum pada :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp452.869.950,00;
- 2) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sebesar Rp127.560.600,00;
- 3) Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan sebesar Rp4.821.400,00;
- 4) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp128.789.450,00;

**Belum memenuhi** alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kota Padang yaitu sekurang-kurangnya **0,50%** (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus **menambahkan jumlah alokasi** anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Padang, sekurang-kurangnya 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

- 1) Kegiatan pengawasan, yaitu :
  - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
  - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;
  - c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - d) Reviu Laporan Keuangan;
  - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
  - f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat

sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
- 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kota Padang menjadi sebesar Rp5.810.219.000,00 atau 0,23% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kota Padang **sudah memenuhi** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang harus **tetap konsisten** dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kota Padang dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Padang **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Padang mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang sebesar Rp928.000.300,00 atau 0,04% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kota Padang agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Padang dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kota Padang **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kota Padang sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Wali Kota/Wali Kota di wilayah kerja masing-masing sebesar Rp514.788.700,00 atau 0,02% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kota Padang **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4ji) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Penyediaan Anggaran Pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar



Rp2.939.247.100,00 atau 0,11% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kota Padang **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp885.630.553.046,00 atau 84,81% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.044.297.337.123,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sudah *memenuhi* amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Wali Kota/Wali Kota wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

*Untuk itu, Pemerintah Kota Padang harus terus berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Wali Kota Padang:*

- (a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah;

- (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
  - (3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP.
- (c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan:
- (1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
  - (2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;
  - (3) melaksanakan *E-purchasing* melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - (4) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.

#### 7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp2.356.815.426.414,00 atau 91,88% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.565.006.041.510,00, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada jenis belanja :

##### a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.354.560.553.239,00 atau 52,81% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp1.195.745.865.239,00 atau 46,62% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

**Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.** Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp827.526.009.956,00 atau 32,26% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp45.886.683.666,00.
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi sebesar Rp1.823.147.551,00.
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp4.837.235.323,00.
- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp5.503.680,00.
- e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp112.320,00.
- f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp336.960,00.
- g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp669.600.000,00.
- h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp6.000.000,00.
- i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp9.000.000,00.

Yang diperuntukkan bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.1)h)(5) dan butir C.3.a.1)h)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp26.572.210.400,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) Belanja Uang Representasi DPRD sebesar Rp1.004.010.000,00.
  - (2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp1.455.814.500,00.
  - (3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp7.938.000.000,00.
  - (4) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp1.984.500.000,00.
  - (5) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp6.750.960.000,00.
  - (6) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp6.066.360.000,00.
  - (7) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp6.396.000.000,00.
- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp393.120.000,00;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp825.000.000,00 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sudah sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 150 milyar dialokasikan yaitu paling rendah sebesar Rp600.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,15%. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp296.001.438.494,00 atau 11,54% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja :

- a) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp284.483.233.858,00.
  - b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebesar Rp1.247.204.636,00.
  - c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebesar Rp7.571.000.000,00.
  - d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebesar Rp2.700.000.000,00.
- 6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp188.885.142.667,00.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir C.3.a.1)h)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp148.181.222.000,00.
- 8) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp1.073.966.000,00.
- 9) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PPPK sebesar Rp8.899.500.000,00.
- 10) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PPPK sebesar Rp660.000.000,00.

Untuk poin 7) dan 10) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.vii)(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

- a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp19.637.455.019 atau 3,57% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp550.283.771.238,00 diuraikan sebagai berikut :
  - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp13.306.441.089,00.

- (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp1.140.632.302,00.
- (3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp5.190.381.628,00.
- b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp1.733.964.271,00 atau 3,81% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp45.515.024.042,00 diuraikan sebagai berikut :
  - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp968.493.578,00.
  - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp126.370.475,00.
  - (3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp639.100.218,00.

*Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 12) Belanja Honorarium sebesar Rp15.685.520.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
  - a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp14.696.690.000,00.
  - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp757.160.000,00.
  - c) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebesar Rp231.670.000,00.
- 13) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp95.100.000,00 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
  - a) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp95.100.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana

dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

*Pemerintah Kota Padang dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)h)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.*

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar Rp847.916.275.379,00 atau 33,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang sebesar Rp147.351.485.058,00 yang antara lain diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp146.526.497.434,00, antara lain diuraikan pada :
  - a) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp22.085.098.792,00.
  - b) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp2.763.218.902,00.
  - c) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp190.696.000,00.
  - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp14.939.320.898,00.
  - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp2.730.254.418,00.
  - f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp3.937.168.440,00.
  - g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp2.151.963.569,00.
  - h) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp8.053.865.193,00.
  - i) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp2.217.625.665,00.
  - j) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata sebesar Rp725.172.020,00.
  - k) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp1.248.790.100,00.
  - l) Belanja Obat-Obatan-Obat sebesar Rp5.386.551.563,00.

- m) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp8.280.209.637,00
- n) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp36.597.846.110,00.
- o) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp3.582.747.200,00.
- p) Belanja Natura dan Pakan-Pakan sebesar Rp1.304.796.000,00.
- q) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp13.302.225.028,00.
- r) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp2.067.675.459,00.
- s) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp11.841.626.000,00

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2)c)(1)(b), butir C.3.a.2)c)(1)(c) dan butir C.3.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 2) Belanja Jasa sebesar Rp401.696.926.833,00 yang antara lain diuraikan :
  - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp324.034.229.630,00 yang diuraikan antara lain :
    - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp14.600.938.200,00.
    - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.525.480.000,00.
    - (3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp1.074.600.000,00.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi



anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (4) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp33.652.080.000,00.
- (5) Belanja Jasa Tenaga Kesehatan sebesar Rp148.285.000,00.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Laboratorium sebesar Rp1.475.152.500,00.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp16.954.600.000,00.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp7.363.200.000,00.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana sebesar Rp1.240.800.000,00.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Perhubungan sebesar Rp3.146.400.000,00.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp28.122.200.000,00.
- (12) Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer sebesar Rp2.309.646.000,00.
- (13) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp21.166.000.000,00.
- (14) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp49.108.267.224,00.
- (15) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp26.530.738.000,00.
- (16) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp16.701.602.600,00.
- (17) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.183.200.000,00.

*Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap*

melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

*Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kota Padang **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.*

(18) Belanja Tagihan Telepon sebesar Rp695.448.000,00.

(19) Belanja Tagihan Air sebesar Rp2.066.887.400,00.

(20) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp68.635.725.482,00.

(21) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp6.402.100.444,00.

Penganggarnya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Lembur sebesar Rp3.456.069.000,00.

Penganggarnya disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

c) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp39.633.116.544,00 yang diuraikan:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp22.343.025.600,00.

(2) Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 sebesar Rp4.063.046.400,00.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kota Padang tidak

diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN sebesar Rp2.781.929.900,00.

(4) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp380.646.000,00.

(5) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp1.212.277.500,00.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c)(2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

(1) Belanja Sewa Tanah sebesar Rp430.221.600,00.

(2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp12.256.209.713,00.

(3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.755.644.000,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan

kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

- e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp4.247.500.000,00.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kota Padang dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp11.972.423.500,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kota Padang.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp60.249.230.920,00 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp38.150.825.422,00.  
b) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.986.893.153,00.  
c) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp2.111.512.345,00.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp73.770.530.416,00 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp73.587.251.416,00.
- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp183.279.000,00.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya ***ditrastionalkan dan dikurangi*** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kota Padang agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Padang untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kota Padang sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangan), untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kota Padang*, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kota Padang dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp31.794.425.000,00 yang diuraikan pada:
  - a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp1.559.870.000,00.
  - b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp30.234.555.000,00.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BOS sebesar Rp8.346.860.151,00.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp66.623.578.367,00.
- 3) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp26.030.500.000,00.
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebesar Rp13.429.759.476,00.
- 5) Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp15.055.100.000,00.
- 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Rp9.027.502.006,00.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp138.513.300.000,00, **lebih kecil** dari alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp138.648.300.000,00, **belum sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp4.582.490.000,00.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp66.430.098.785,00.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp2.474.373.039,00.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp1.775.000.000,00.
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp560.000.000,00.
- 6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar Rp150.000.000,00.
- 7) Belanja Modal Aset Lainnya BLUD Rp365.000.000,00.

Belanja BLUD sebesar Rp76.336.961.824,00 **tidak sama** dengan target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp75.000.000.000,00. **Belum sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar Rp103.283.659.399,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp34.067.373.721,00.
- 2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp3.245.000.000,00.
- 3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp23.156.839.678,00.
- 4) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp26.030.500.000,00.
- 5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.728.846.000,00.

f. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp9.486.180.000,00 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan pada Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan

Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kota Padang telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Padang serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

**Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kota Padang baru sebesar Rp121.337.028.356,00 atau 4,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka Pemerintah Kota Padang wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.**

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

**Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam KUA-PPAS.**

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp1.728.846.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor



5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kota Padang agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kota Padang sebesar Rp27.602.373.721,00 atau 60,00% dari total NPHD sebesar Rp46.003.955.940,00 dan Bawaslu Kota Padang sebesar Rp6.465.000.000,00 atau 60,00% dari total NPHD sebesar Rp10.775.000.000,00.

*Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kota Padang Tahun 2024, Pemerintah Kota Padang **sudah memenuhi** alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kota Padang sebesar sisa total kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kota Padang.*

#### 8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp196.381.061.744,00 atau 7,66% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **C.3.b.1), C.3.b.2)** dan butir **C.3.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu

dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Wali Kota Padang sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **C.3.b.7), C.3.b.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp48.902.436.709,00 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
  - 1) Belanja Modal Alat Besar sebesar Rp2.601.618.960,00.
  - 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp7.797.076.000,00.
  - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp12.728.278.274,00.
  - 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp1.023.388.230,00.
  - 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp5.778.089.460,00.
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp59.435.068.323,00.
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp77.488.913.706,00 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
  - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp57.407.416.749,00.
  - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp16.436.354.811,00.
  - 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp665.155.000,00.
  - 4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp2.419.987.146,00.
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp9.805.534.006,00.
- e. Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp749.109.000,00.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

*Pemerintah Kota Padang tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.*

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir **C.3.b.4)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp267.074.930,00.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp2.213.169.340,00.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp11.809.553.352,00 atau 0,46% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **C.3.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp34.915.338.188,00, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 12  
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022			%	Target APBD Tahun Anggaran 2023			%	Target APBD Tahun Anggaran 2024			Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2023	%	% dari Target APBD Tahun Anggaran 2024 dan Realisasi APBD TA. 2023 per 10 November 2023
	Realisasi		Target		Realisasi Per 10 November 2023		(Rp)		(Rp)					
	2	3			6	7-6:5								
1			4-3:2											
PENDAYAJAN														
Penerimaan Pembiayaan	83.784.381.410,00	46.132.557.148,79	121,17	8.350.000.000,00	84.418.493.646,08	1010,96	34.916.338.188,00	26.568.338.188,00						
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	83.308.992.492,00	68.732.557.148,79	82,50	30.000.000.000,00	89.801.232.481,08	299,34	48.486.816.000,00	18.686.816.000,00						
	25.646.639.022,00	25.646.639.021,94	100,00	30.000.000.000,00	89.801.232.481,08	299,34	0,00	(30.000.000.000,00)						
Pelampauan penerimaan PAD	(292.174.018.242,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer	(4.042.107.474,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	(24.374.995.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Penghematan Belanja	342.998.389.746,00	508.794.721,09	0,15	28.000.000.000,00	68.365.552.413,29	244,16	38.000.000.000,00	10.000.000.000,00						
Sisa Dana Akibat Tidak Terapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.686.816.000,00	5.686.816.000,00						
Pembayaran	3.239.369.992,00	25.137.844.300,85	776,01	2.000.000.000,00	21.435.680.037,79	1071,78	2.000.000.000,00	0,00						
Sisa Belanja Lainnya	87.662.363.470,00	49.088.918.126,86	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	29.684.641.082,00	3.600.000.000,00	12,18	21.680.000.000,00	5.385.738.906,00	24,88	10.771.477.812,00	(10.878.522.188,00)						
Penyertaan Modal Daerah	24.749.445.038,00	3.600.000.000,00	14,55	8.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	(8.300.000.000,00)						
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	4.805.196.044,00	0,00	0,00	13.350.000.000,00	5.385.738.906,00	40,34	10.771.477.812,00	(2.578.522.188,00)						

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri :

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp45.686.816.000,00. Penerimaan pembiayaan tersebut berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

***Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada penghitungan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2)a)(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.***

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kota Padang *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kota Padang *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir C.4.a.2)a)(3)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp10.771.477.812,00 yang berasal dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp10.771.477.812,00.

Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo tersebut digunakan untuk menganggarkan pokok utang yang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama yang harus diselesaikan

dalam tahun anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pinjaman sebagaimana ditegaskan pada pasal 77 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.4.b.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12

Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	RKPD	KUA-PPAS	P - APBD
1.	Jumlah Program	242	298	303	413
2.	Jumlah Kegiatan	-	717	724	838
3.	Jumlah Sub Kegiatan	-	2424	2444	2806
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	2.877.913.551.886	2.359.447.212.071,00	2.368.679.164.510,00	2.565.006.041.510,00

Jumlah program sebanyak 413, jumlah kegiatan sebanyak 838 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 2806 pada Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Kota Padang Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kota Padang **hanya diperkenankan** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap sub kegiatan yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 namun tidak terdapat dalam RKPD atau KUA dan PPAS, antara lain:

1. Dinas Kesehatan antara lain :

- Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

2. Puskesmas

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
- Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
  - d. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
  - e. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
  - f. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
  - g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
  - h. . Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
  - i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
  - j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
  - k. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
  - l. Operasional Pelayanan Puskesmas
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
- a. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota.
  - b. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
  - c. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota.
  - d. Pemeliharaan Berkala Jalan.
  - e. Pemeliharaan Rutin Jembatan.
  - f. Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota.
4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, Dan Keluarga Berencana
- a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.
  - b. Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).
  - c. Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita).

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 **belum** berpedoman pada RKPD serta KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Padang harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kota Padang menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KOTA PADANG TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 Rp2.877.9130.551.886,00 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp2.565.006.041.510,00; dan
2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 242 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 413 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kota Padang agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Padang Tahun 2019-2024.

#### VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kota Padang dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Padang tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Padang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.



- B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
    - a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
    - b. pemeliharaan anak-anak terlantar;
    - c. pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
    - d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
    - e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
  2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
    - a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;
    - b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.
  3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
    - a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota;
    - b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan
    - c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
  4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
  5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- C. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kota Padang agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD TA. 2024. ***Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan.*** Untuk itu, pada saat pemerintah Kota Padang menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang Tahun 2024 antara Wali Kota Padang dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kota Padang.

- D. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan.
- E. Pemerintah Kota Padang agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.
- F. Pemerintah Kota Padang agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut maka Wali Kota Padang agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan HUT Satpol PP Ke-74 dan Satlinmas Ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumatera Barat. Untuk itu diminta Wali Kota Padang menyiapkan dan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI